



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng 92812

Telepon (0414) 22333

Pos el setda@kepulauanseyarkab.go.id

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 56/II/TAHUN 2025/SETDA**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR I/I/TAHUN 2025/SETDA TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan adanya perubahan nama kegiatan pada bagian Kesejahteraan Rakyat maka lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar nomor 1/I/Tahun 2025/Setda tentang pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar perlu diubah dan ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Surat Keputusan Mengenai Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 215);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor I/I/Tahun 2025/Setda tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 1/I/TAHUN 2025/SETDA tentang pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 2 Februari 2025

**a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIS DAERAH,**



Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Wakil Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah di Benteng;
6. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 59/II/TAHUN 2025/SETDA
TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 1/I/TAHUN
2025/SETDA TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN LINGKUP
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2025

PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN
LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025

NO		NAMA KEGIATAN		JABATAN	
1		2		4	
I		SEKRETARIAT DAERAH		Kepala Bagian Umum dan Protokol	
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		ANDI MUHAMMAD AWALUDDIN, SAP/ 19791213 200604 1 020	s d a	s d a
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		s d a	s d a	s d a
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		s d a	s d a	s d a
4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		s d a	s d a	s d a
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan		s d a	s d a	s d a
6	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		s d a	s d a	s d a
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		s d a	s d a	s d a
8	Penyediaan Pakan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		s d a	s d a	s d a
9	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		s d a	s d a	s d a
10	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		s d a	s d a	s d a
11	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		s d a	s d a	s d a
12	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		s d a	s d a	s d a
II		ASISTEN ADMINISTRASI UMUM		Kepala Bagian Umum dan Protokol	
A. BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL		ANDI MUHAMMAD AWALUDDIN, SAP/ 19791213 200604 1 020		s d a	
1	Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		s d a	s d a	s d a
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		s d a	s d a	s d a
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		s d a	s d a	s d a
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		s d a	s d a	s d a
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		s d a	s d a	s d a
6	Penyediaan Bahan/Material		s d a	s d a	s d a
7	Fasilitas Kunjungan Tamu		s d a	s d a	s d a
8	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		s d a	s d a	s d a
9	Pengadaan Mebel		s d a	s d a	s d a
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		s d a	s d a	s d a
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		s d a	s d a	s d a
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		s d a	s d a	s d a
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		s d a	s d a	s d a
14	Pemeliharaan Mebel		s d a	s d a	s d a

NAMA KEGIATAN		JABATAN	
NO		NAMA/NIP	DALAM STRUKTURAL ORGANISASI
2		3	4
1			
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	s d a	s d a
16	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	s d a	s d a
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	s d a	s d a
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	s d a	s d a
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	s d a	s d a
20	Facilitasi Keprotokolan	s d a	s d a
21	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	s d a	s d a
B. BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ANDI MUHAMMAD AWAUDDIN, SAP/ 19791213 200604 1 020	Kepala Bagian Umum dan Protokol s d a s d a
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	s d a	s d a
3	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	s d a	s d a
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	s d a	s d a
C. BAGIAN ORGANISASI			
1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	HASMAWATI, S.E./19820401 200212 2 002	Pt. Kepala Bagian Organisasi s d a
2	Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	s d a	s d a
3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	s d a	s d a
4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	s d a	s d a
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	s d a	s d a
III ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
A. BAGIAN PEMERINTAHAN			
1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Dr. TAJUDDIN MAKKA, S.STP., M.M./ 19830910 200312 1 005	Kepala Bagian Tata Pemerintahan s d a
2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	s d a	s d a
3	Facilitasi Otonomi Daerah	s d a	s d a
4	Facilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	s d a	s d a
B. BAGIAN HUKUM			
1	Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Hj. MIMI JULIANTI, S.H., M.H./ 19720428 200312 2 005	Kepala Bagian Hukum s d a
2	Facilitasi Bantuan Hukum	s d a	s d a
3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	s d a	s d a
C. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
1	Pelaksanaan STQH Tingkat Provinsi	H. SAMSUL BAHRI, S.E./19701016 199803 1 012	Kepaa Bagian Kesejahteraan Rakyat s d a
2	Pelaksanaan STQH Tingkat Kabupaten	s d a	s d a
3	Pelaksanaan Pemberangkatan Jamaah Haji	s d a	s d a
4	Pelaksanaan Pemulangan Jamaah Haji	s d a	s d a
5	Pelaksanaan Penyaluran Dana Hibah/Bansos	s d a	s d a
6	Pengelolaan dan Evaluasi Pendidik Tilawatil Qur'an, Kitab Kuning, Hafidz dan Imam Tetap Mesjid Agung	s d a	s d a
7	Pelaksanaan Hari-hari Besar Islam	s d a	s d a
8	Penyaluran Insentif Guru BTQ	s d a	s d a
9	Pemberian Santunan Veteran kepada Anggota Veteran dan Onderstand	s d a	s d a

NAMA KEGIATAN		NAMA/NIP		JABATAN
NO		3		DALAM STRUKTURAL ORGANISASI
1	2	3		4
IV	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
1	A. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM			
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	MURSALIM, S.Sos/19841207 201101 1 010		Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Air
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	s d a		s d a
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	s d a		s d a
4	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	s d a		s d a
5	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	s d a		s d a
6	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah			
B. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				
1	Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Drs. TAUFIQ NURHARAS, M. Ec.Dev/		Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	19680828 198811 1 002		s d a
3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	s d a		
C. BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA				
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	HASRUL, S.E./19790129 200604 1 011		Kasubag. Pengelolaan Barang dan Jasa
2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	s d a		s d a
3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	s d a		s d a

a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIS DAERAH,

